

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai urgensi kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab arti urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni :

1. Dilihat dari berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai advokat. Dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang advokat didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah :

- a. dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, advokat memiliki tugas yakni memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selama dalam waktu pada tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP). Khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun (pasal 56 ayat (1) KUHAP).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, wewenang advokat ialah :

- 1) menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan (pasal 69 KUHAP);

- 2) menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (pasal 70 ayat (1) KUHAP);
 - 3) menerima turunan “Berita Acara Pemeriksaan” (pasal 72 KUHAP);
 - 4) mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. (pasal 73 KUHAP).
- b. dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), tugas advokat adalah :
- 1) memberi jasa pelayanan hukum, meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (pasal 1 butir 2 UU Advokat) ;
 - 2) memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (pasal 22 ayat (1) UU Advokat);
 - 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya keran adanya hubungan profesi (pasal 19 ayat (1) UU Advokat).

Sedangkan, wewenang advokat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah :

- 1) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan dengan berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (pasal 14 UU Advokat);
- 2) tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam membela perkara (pasal 16 UU Advokat).

- 3) memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan guna pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 17 UU Advokat).
- c. dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), tugas advokat ialah memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu (pasal 56 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan wewenang advokat dalam UU Kekuasaan Kehakiman ialah berkaitan dengan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni fungsi pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman);
- d. dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), tugas advokat adalah :
- 1) melakukan pelayanan bantuan hukum (pasal 9 huruf d UU Bantuan Hukum)
 - 2) menyelenggarakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum (pasal 9 huruf c UU Bantuan Hukum)
- Sedangkan, wewenang advokat ialah :
- 1) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara (pasal 9 huruf (e) UU Bantuan Hukum);
 - 2) mendapatkan informasi dari instansi pemerintah guna pembelaan (Pasal 9 huruf (f) UU Bantuan Hukum).

2. Dalam urgensinya advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka, terdapat empat urgensi penting advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia :
 - a. advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum;
 - b. advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan;
 - c. advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum;
 - d. advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia.

Keberadaan empat urgensi penting itu, merupakan suatu bentuk penegasan dan penguatan kedudukan advokat sebagai penegak hukum didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga dengan demikian, dapat memperkuat kedudukan advokat sebagai penegak hukum sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan urgensi kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana, yakni:

1. perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya pasal mengenai perannya ia sebagai penegak hukum secara konkrit, sehingga urgensi advokat sebagai penegak hukum dapat terlihat dengan jelas.
2. untuk mendukung adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dilakukan, sebab keberadaanya sebagai hukum formil yang mengatur tentang tata cara pengadilan pidana di Indonesia. Dengan meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi masing-masing komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat agar tercipta sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Kemudian dalam rangka penegasan dan penguatan kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka pengaturan mengenai advokat dalam membela tersangka dan terdakwa perlu diperluas, tidak hanya pada proses pemeriksaan tetapi juga hingga proses pelaksanaan putusan, selain itu pula perlunya suatu sanksi batal demi hukum yang diberikan kepada para penegak hukum yang tidak menjalankan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini akan menjadikan sebuah proses peradilan yang adil, dan disisi lain juga dapat meningkatkan profesionalisme dari para penegak hukum.